

DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BAPPEDA MUARA ENIM

Hevan Walizi^{1*}

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim

*Corresponding email:

hevanw@gmail.com

Abstrak: Salah satu dampak utama dari kebijakan efisiensi anggaran di Bappeda Muara Enim adalah perubahan dalam prioritas alokasi dana. Pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan proyek-proyek yang akan didanai, sehingga hanya program yang dianggap benar-benar strategis yang akan mendapatkan alokasi anggaran penuh. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Bappeda Muara Enim dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan untuk mengetahui dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di Bappeda Muara Enim, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini adalah Dengan menerapkan strategi prioritas dalam pembangunan infrastruktur, digitalisasi sistem administrasi, serta penguatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan, efisiensi anggaran dapat dijalankan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Pemanfaatan teknologi dan metode manajemen proyek yang lebih ketat juga berkontribusi dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas.

Kata kunci: efisiensi anggaran, sasaran pembangunan, bappeda.

Abstract: One of the main impacts of the budget efficiency policy at Bappeda Muara Enim is the shift in funding allocation priorities. The local government must be more selective in determining which projects will be funded, ensuring that only programs deemed truly strategic receive full budget allocations. The objective of this research is to understand the implementation of the budget efficiency policy at Bappeda Muara Enim in planning and executing regional development, as well as to examine the impact of budget efficiency policies on achieving regional development targets in Bappeda Muara Enim, particularly in economic, social, and infrastructure aspects. This study employs a qualitative research method. The findings of this research indicate that by prioritizing infrastructure development, digitalizing administrative systems, and strengthening the capacity of government human resources, budget efficiency can be implemented without compromising the quality of public services. The use of technology and stricter project management methods also contributes to optimizing the utilization of limited budgets.

Keywords: budget efficiency, development targets, Bappeda

PENDAHULUAN

Dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di Bappeda Muara Enim merupakan isu yang kompleks karena melibatkan keseimbangan antara keterbatasan sumber daya dan kebutuhan pembangunan. Menurut (Nurafni et al., 2024) kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung program pembangunan daerah. Namun, dalam praktiknya, efisiensi anggaran sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan alokasi dana untuk sektor prioritas, pemangkasan anggaran yang dapat mempengaruhi kelangsungan proyek strategis, serta potensi penundaan atau pengurangan kualitas layanan publik. Efisiensi anggaran yang dilakukan dengan strategi pemangkasan belanja operasional dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi jika tidak dirancang secara matang, justru dapat menghambat pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan. Dalam konteks Bappeda Muara Enim, kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada berbagai sektor pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu dampak utama dari kebijakan efisiensi anggaran di Bappeda Muara Enim adalah perubahan dalam prioritas alokasi dana. Pemerintah daerah harus lebih selektif dalam

menentukan proyek-proyek yang akan didanai, sehingga hanya program yang dianggap benar-benar strategis yang akan mendapatkan alokasi anggaran penuh. Hal ini dapat berdampak positif jika dana yang tersedia benar-benar difokuskan pada program pembangunan yang memiliki manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat (Kusumaningrum & Sugiyanto, 2021). Namun, di sisi lain, keterbatasan anggaran dapat menyebabkan beberapa proyek mengalami penundaan atau bahkan dibatalkan, terutama jika program tersebut tidak dianggap sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Misalnya, proyek pembangunan infrastruktur yang seharusnya mendukung konektivitas wilayah dapat mengalami keterlambatan akibat keterbatasan anggaran, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan mobilitas masyarakat.

Kebijakan efisiensi anggaran juga berpengaruh pada efektivitas pelayanan publik di Muara Enim. Pemangkasan anggaran dalam sektor pendidikan dan kesehatan, misalnya, dapat mengurangi akses masyarakat terhadap layanan yang berkualitas. Menurut (Sonny, 2012) jika anggaran pendidikan dikurangi, maka kemungkinan besar alokasi untuk beasiswa, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta pelatihan guru juga akan berkurang, yang dapat berakibat pada menurunnya kualitas pendidikan di daerah tersebut. Begitu pula dalam sektor kesehatan, jika alokasi anggaran untuk program kesehatan dikurangi, maka pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk penyediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan, bisa mengalami kendala. Efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya berfokus pada pengurangan belanja, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Strategi efisiensi yang diterapkan di Bappeda Muara Enim harus tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas dan keberlanjutan pembangunan agar tidak mengorbankan layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (Saputra et al., 2018).

Kebijakan efisiensi anggaran di Bappeda Muara Enim juga mempengaruhi aspek perencanaan dan pengelolaan program pembangunan. Dengan adanya tekanan untuk menghemat anggaran, pemerintah daerah harus lebih inovatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif, seperti melalui skema kerja sama dengan pihak swasta atau pemanfaatan dana hibah dari pemerintah pusat maupun lembaga donor. Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran menjadi semakin penting agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan daerah. Transparansi dalam perencanaan dan eksekusi anggaran juga menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan publik (Gunawan, 2018).

Meskipun terdapat berbagai tantangan, kebijakan efisiensi anggaran juga memiliki potensi manfaat jangka panjang jika diterapkan dengan strategi yang tepat. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, pemerintah daerah dapat mengurangi pemborosan dalam belanja operasional dan memastikan bahwa setiap program yang dibiayai benar-benar memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah (Ginting et al., 2024). Efisiensi anggaran juga dapat mendorong reformasi dalam sistem birokrasi, di mana pemerintah daerah dituntut untuk bekerja lebih cerdas dan produktif dalam menyusun kebijakan pembangunan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, misalnya, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi dan pengawasan anggaran, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan terkontrol.

Dampak kebijakan efisiensi anggaran di Bappeda Muara Enim juga dapat dilihat dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah daerah perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai program pembangunan, baik melalui inisiatif swadaya maupun kerja sama dengan komunitas lokal. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga keterbatasan dana dapat

diatasi dengan dukungan dan keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan perubahan yang positif dan berdampak luas (Muh Zulfi Qadri, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah di Bappeda Muara Enim. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman, persepsi, dan strategi yang diterapkan oleh pemangku kebijakan serta dampaknya terhadap pembangunan daerah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Bappeda, anggota legislatif daerah, serta masyarakat yang terdampak oleh kebijakan tersebut. Teknik observasi digunakan untuk memahami implementasi kebijakan di lapangan, sementara analisis dokumen dilakukan terhadap laporan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah. Analisis data dilakukan secara tematik dengan metode reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan tren utama yang muncul dari hasil penelitian. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, guna memastikan bahwa temuan penelitian dapat menggambarkan realitas kebijakan secara akurat. Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana efisiensi anggaran mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pemerintahan di Muara Enim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Bappeda Muara Enim dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah menjadi aspek yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara keterbatasan sumber daya dan pencapaian target pembangunan. Efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, terutama dalam sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Yaqin et al., 2018). Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan alokasi dana, pengurangan anggaran operasional, serta tekanan untuk tetap menjaga kualitas layanan publik. Strategi yang diterapkan oleh Bappeda Muara Enim dalam menyusun perencanaan anggaran harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti pemetaan kebutuhan, penyesuaian program prioritas, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap implementasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden tahun 2025 nomor 1.

Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 2025 menggarisbawahi kebijakan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Inpres ini menginstruksikan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk melakukan reviu dan penghematan anggaran sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, dengan total efisiensi sebesar Rp306,7 triliun, yang mencakup belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan transparansi, serta mengalokasikan dana secara optimal bagi pembangunan prioritas nasional (Inpres, 2025).

Dalam tahap perencanaan, Bappeda Muara Enim menerapkan pendekatan berbasis prioritas dengan menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak dan memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Proses ini diawali dengan analisis kebutuhan pembangunan daerah yang dilakukan melalui kajian data dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, legislatif, serta perwakilan masyarakat. Penyusunan rencana anggaran juga mengacu pada dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam menentukan alokasi anggaran secara efektif dan efisien. Bappeda Muara Enim menggunakan mekanisme evaluasi kinerja program tahun sebelumnya sebagai dasar untuk memperbaiki alokasi anggaran, memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan tepat sasaran, dan menghindari pemborosan (Krisniawati, 2021).

Salah satu strategi utama dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Bappeda Muara Enim adalah optimalisasi belanja operasional pemerintah daerah. Pemangkasan anggaran operasional dilakukan dengan menekan biaya-biaya yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pembangunan, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, serta belanja barang yang kurang esensial (Zairi, 2019). Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk program pembangunan yang bersifat produktif, seperti peningkatan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta penguatan sektor ekonomi masyarakat. Namun, efisiensi anggaran ini juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menghambat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang seimbang antara pengurangan belanja yang tidak perlu dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mendukung operasional pemerintahan yang optimal.

Selain efisiensi dalam belanja operasional, Bappeda Muara Enim juga menerapkan strategi inovatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong kerja sama dengan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP), di mana pemerintah daerah bekerja sama dengan sektor swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan proyek pembangunan (Aprisyah & Yulianti, 2021). Model ini memungkinkan pemerintah daerah untuk tetap menjalankan proyek strategis meskipun mengalami keterbatasan anggaran, karena sebagian pembiayaan ditanggung oleh mitra swasta dengan prinsip bagi hasil atau insentif tertentu. Selain itu, Bappeda juga aktif dalam mencari sumber pendanaan dari hibah pemerintah pusat, bantuan internasional, serta pemanfaatan dana desa yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil di tingkat lokal.

Dalam pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap program yang didanai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Bappeda Muara Enim menggunakan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memantau efektivitas penggunaan anggaran di setiap tahapan proyek pembangunan. Menurut (Rahmawati & Adiyatama, 2023) salah satu mekanisme yang diterapkan adalah penggunaan sistem e-budgeting dan e-planning, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara lebih transparan, menghindari praktik korupsi, serta memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Selain itu, evaluasi berkala dilakukan untuk menilai apakah proyek yang dijalankan telah mencapai target yang ditetapkan, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran.

Meskipun kebijakan efisiensi anggaran memiliki manfaat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam

implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah risiko keterbatasan dana yang dapat menghambat pelaksanaan proyek pembangunan, terutama jika pemangkasan anggaran dilakukan secara drastis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Menurut (Wongkar et al., 2021) ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi pendapatan daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas anggaran, sehingga pemerintah daerah harus memiliki strategi mitigasi risiko yang tepat untuk menghadapi kemungkinan penurunan pendapatan. Bappeda Muara Enim perlu mengembangkan kebijakan yang fleksibel dan adaptif dalam merespons dinamika ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah.

Dalam jangka panjang, keberhasilan implementasi kebijakan efisiensi anggaran di Bappeda Muara Enim sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip tata kelola yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam mengelola sumber daya yang tersedia (Lirda et al., 2023). Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, kebijakan efisiensi anggaran dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik, dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Muara Enim.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Bappeda Muara Enim memiliki dampak yang luas terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Efisiensi anggaran bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan dana pemerintah lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini tidak hanya membawa keuntungan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah (Rahmanto et al., 2021). Secara ekonomi, efisiensi anggaran dapat meningkatkan stabilitas keuangan daerah dengan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif dan mengalokasikan dana ke sektor yang lebih prioritas. Dari segi sosial, kebijakan ini dapat berdampak pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola prioritas anggaran. Sementara itu, dalam aspek infrastruktur, efisiensi anggaran berperan dalam menentukan kelangsungan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan.

Dalam aspek ekonomi, kebijakan efisiensi anggaran dapat membantu meningkatkan kemandirian fiskal daerah dengan memastikan bahwa belanja pemerintah dikelola secara optimal. Menurut (Sadikin et al., 2021) dengan menekan pemborosan dan menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana ke program yang memiliki dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), investasi di bidang pertanian, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan vokasi. Namun, di sisi lain, pemangkasan anggaran yang dilakukan secara drastis juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jika tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang. Misalnya, pengurangan anggaran untuk program bantuan usaha dapat menghambat perkembangan UMKM, yang merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah. Dalam menerapkan efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus mempertimbangkan keseimbangan antara penghematan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dari perspektif sosial, kebijakan efisiensi anggaran dapat memberikan dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dilakukan dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran dapat meningkatkan efektivitas program sosial dengan mengalokasikan

dana ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, dengan mengurangi belanja operasional yang kurang mendesak, pemerintah dapat meningkatkan anggaran untuk program pendidikan gratis, layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta bantuan sosial bagi kelompok rentan (Ashari & Kaukab, 2020). Namun, jika efisiensi anggaran dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat, maka dapat terjadi penurunan kualitas layanan publik. Misalnya, pemangkasan anggaran untuk sektor kesehatan dapat mengurangi jumlah tenaga medis yang tersedia atau membatasi akses masyarakat terhadap obat-obatan dan fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, dalam sektor pendidikan, pengurangan anggaran dapat menyebabkan keterbatasan sarana belajar, berkurangnya tenaga pendidik, dan minimnya dukungan terhadap program pendidikan inklusif. Dalam mengelola kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak mengorbankan kualitas layanan publik yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.

Dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pembangunan infrastruktur juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Infrastruktur merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah, karena berperan dalam meningkatkan konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika kebijakan efisiensi anggaran diterapkan dengan baik, maka pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan, seperti jalan dan jembatan di daerah terpencil, peningkatan kualitas jaringan listrik dan air bersih, serta pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Silalahi & Ginting, 2020). Efisiensi anggaran juga dapat mendorong inovasi dalam pengelolaan proyek infrastruktur, seperti penerapan skema kerja sama pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership/PPP) untuk membiayai proyek-proyek strategis yang membutuhkan investasi besar. Namun, di sisi lain, jika pemangkasan anggaran dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur, maka bisa terjadi keterlambatan atau bahkan penghentian proyek yang telah direncanakan. Misalnya, pemotongan anggaran pada sektor konstruksi dapat menyebabkan proyek pembangunan jalan yang tertunda, menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, pemangkasan anggaran pada sektor perawatan infrastruktur juga dapat mengakibatkan menurunnya kualitas fasilitas umum, yang pada akhirnya akan meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang.

Kebijakan efisiensi anggaran juga berpengaruh terhadap kapasitas birokrasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengurangan anggaran untuk operasional pemerintah dapat berdampak pada keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas kerja yang memadai, serta menurunnya insentif bagi aparatur sipil negara (ASN). Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menghambat efektivitas administrasi pemerintahan dan menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam menerapkan efisiensi anggaran, pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat kinerja birokrasi, tetapi justru mendorong efisiensi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Setya Nusa & Mutmainnah, 2022).

Strategi yang diterapkan oleh Bappeda Muara Enim dalam mengatasi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran berfokus pada optimalisasi perencanaan, efektivitas alokasi sumber daya, serta inovasi dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran yang bertujuan untuk menekan pemborosan sering kali menimbulkan tantangan dalam pencapaian target pembangunan, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Bappeda Muara Enim menerapkan pendekatan strategis yang tidak hanya mempertahankan keberlanjutan pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Menurut (Setyawan, 2022) Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah penyusunan perencanaan

anggaran berbasis kinerja, di mana setiap program dan kegiatan dinilai berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Melalui pendekatan ini, Bappeda memastikan bahwa anggaran yang tersedia dialokasikan secara optimal untuk sektor-sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Bappeda Muara Enim menerapkan strategi pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dengan mengurangi pengeluaran yang tidak produktif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah digitalisasi sistem administrasi dan perencanaan, yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, proses perencanaan dan pengawasan program pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif (Rahmanto et al., 2021). Pengurangan pengeluaran non-prioritas juga dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap program-program yang tidak memberikan dampak optimal bagi masyarakat, sehingga anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih strategis. Misalnya, pengurangan anggaran untuk perjalanan dinas atau biaya operasional yang tidak mendesak dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk tetap melanjutkan program pembangunan infrastruktur atau layanan publik yang lebih mendesak.

Selain efisiensi internal, Bappeda Muara Enim juga mengadopsi strategi diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah daerah. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Model ini memungkinkan pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan proyek-proyek strategis meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Bappeda juga aktif dalam mengajukan proposal pendanaan dari pemerintah pusat maupun organisasi internasional untuk mendukung berbagai program pembangunan. Upaya ini bertujuan untuk memperluas cakupan pembangunan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan (Budi et al., 2020).

Dalam konteks sosial, tantangan utama dari kebijakan efisiensi anggaran adalah potensi penurunan kualitas layanan publik, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, Bappeda Muara Enim menerapkan strategi kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal (Erwin et al., 2024). Dengan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program-program sosial tetap berjalan meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas. Misalnya, dalam sektor pendidikan, kerja sama dengan institusi pendidikan dan dunia usaha dapat membantu mengembangkan program pelatihan vokasi bagi tenaga kerja lokal, sehingga tetap mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tanpa harus mengandalkan dana besar dari APBD.

Dalam sektor infrastruktur, efisiensi anggaran sering kali menimbulkan tantangan berupa keterlambatan atau penundaan proyek pembangunan. Untuk mengatasi hal ini, Bappeda Muara Enim menerapkan strategi optimalisasi skala prioritas pembangunan dengan memastikan bahwa proyek yang memiliki dampak terbesar bagi masyarakat mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Pendekatan ini didukung dengan penerapan sistem manajemen proyek yang lebih ketat, sehingga proyek-proyek yang sedang berjalan dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang tetap terjaga. Strategi lain yang diterapkan adalah pemanfaatan teknologi konstruksi yang lebih efisien dalam hal biaya dan waktu, seperti penggunaan material lokal yang lebih murah namun tetap berkualitas tinggi (Nurafni et al., 2024).

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bappeda juga mendorong program pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mendorong sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Dengan memberikan dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan usaha, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki peluang ekonomi yang kuat meskipun anggaran pembangunan mengalami efisiensi (Khrisnadewi & Praptiestrini, 2022).

Bappeda Muara Enim juga mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat terhadap setiap program pembangunan. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi hambatan yang muncul lebih awal dan mengambil langkah-langkah korektif secara cepat (Nugraheni & Khaerunisa, 2016). Transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi prioritas utama dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan melalui mekanisme partisipatif, seperti forum konsultasi publik dan laporan keterbukaan anggaran. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tetap terjaga, meskipun terjadi pengurangan anggaran di beberapa sektor.

Untuk memastikan keberlanjutan strategi efisiensi anggaran, Bappeda Muara Enim juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Dengan memberikan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) mengenai tata kelola anggaran yang lebih efisien dan inovatif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat diterapkan secara efektif tanpa menghambat kinerja birokrasi. Penguatan kapasitas SDM ini juga mencakup pelatihan dalam pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan (Ilham, 2019).

SIMPULAN

kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di Bappeda Muara Enim memberikan tantangan yang signifikan dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Namun, melalui strategi yang tepat, pemerintah daerah mampu mengatasi keterbatasan anggaran tanpa menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang diterapkan mencakup optimalisasi perencanaan berbasis kinerja, efisiensi dalam alokasi sumber daya, diversifikasi sumber pendanaan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, pendekatan kolaboratif dengan sektor swasta, LSM, dan komunitas lokal juga menjadi solusi penting dalam memastikan bahwa program pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan.

Dengan menerapkan strategi prioritas dalam pembangunan infrastruktur, digitalisasi sistem administrasi, serta penguatan kapasitas SDM aparatur pemerintahan, efisiensi anggaran dapat dijalankan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Pemanfaatan teknologi dan metode manajemen proyek yang lebih ketat juga berkontribusi dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas. Oleh karena itu, meskipun kebijakan efisiensi anggaran dapat mengurangi fleksibilitas fiskal, pendekatan yang inovatif dan adaptif dapat memastikan bahwa pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprisyah, P., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2).
- Ashari, M. I., & Kaukab, M. E. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Jimmba)*, 2(5). <https://doi.org/10.32639/Jimmba.V2i5.669>
- Budi, E. P., Tongko, M., Herawati, H., & Sattu, M. (2020). Upaya Pemerintah Desa Terhadap Penanggulangan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Kesmas Untika Luwuk : Public Health Journal*, 11(2), 56–61. <https://doi.org/10.51888/Phj.V11i2.34>
- Erwin, E., Erfan, E., & Herwan, H. (2024). Strategi Komunikasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Dalam Peningkatan Citra Pemerintahan Kabupaten Bangka. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1). <https://doi.org/10.47134/Villages.V5i1.84>
- Ginting, E., Eka Putri, S., Yonatan Sinaga, Z., William Iskandar Ps, J. V, Baru, K., Percut Sei Tuan, K., Deli Serdang, K., & Penulis, K. (2024). Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat Dalam Peningkatan Apbn Dan Apbd Tahun Anggaran 2023. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1).
- Gunawan, S. E. (2018). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang. *Parsimonia*, 4(33).
- Ilham, I. (2019). Pengaruh Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Terhadap Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cianjur Dan Lima Kabupaten Di Jawa Barat. *Jurnal Momen Teknik Sipil*, 2(1). <https://doi.org/10.35194/Momen.V2i1.642>
- Inpres. (2025). Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. *Instruksi Presiden Republik Indonesia*.
- Khrisnadewi, A., & Praptiestrini. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013 S/D 2016). *Surakarta Accounting Review (Sarev)*, 4(1), 35–43.
- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/Ihtiyath.V5i1.2572>
- Kusumaningrum, E. B., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Ekonomi Bisnis*, 27(2), 630–643. <https://doi.org/10.33592/Jeb.V27i2.1815>
- Lirda, M., Rice Haryati, & Delori Nanci Meyla. (2023). Pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat). *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.31933/Epja.V1i3.918>
- Muh Zulfi Qadri, A. H. P. H. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah, Nilai Tukar, Suku Bunga, Dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Seiko : Journal Of Management & Business*, 5(1).
- Nugraheni, & Khaerunisa, L. (2016). Analisis Proses Penyusunan E-Budgeting Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 4(02).

- Nurafni, A., Pembangunan, U., Budi, P., Sembiring, R., Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). *Pengaruh Anggaran Belanja Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sumut*. 2(8), 909–922.
- Rahmanto, F., Firmansyah, M. I., Purwaningsih, T., & Rafi, M. (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. *Jwp (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/Jwp.V6i1.29422>
- Rahmawati, E., & Adiyatama, E. A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran, Gaya Kepemimpinan Transaksional Dan Transformasional Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2). <https://doi.org/10.59330/Jai.V1i2.9>
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda. *Journal Peqquruang: Conference Series*, 3(2). <https://doi.org/10.35329/Jp.V3i2.2215>
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2).
- Setya Nusa, I. B., & Mutmainnah, U. G. (2022). Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bandung). *Journal Of Economics, Management, Business And Accounting*, 2(2). <https://doi.org/10.34010/Jemba.V2i2.8539>
- Setyawan, A. (2022). Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(05).
- Silalahi, D. E. S., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2).
- Sonny, H. (2012). Analisis Pengaruh Pengembangan Sdm Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Manajemen*, 09(3).
- Wongkar, D. L., Senduk, V., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V2i1.630>
- Yaqin, U. A., Herwanti, T., & Akram, A. (2018). Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bima). *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V25.I03.P26>
- Zairi, M. (2019). *Serapan Anggaran Rendah, Anggota Dpra, Bardan Sahidi Sebut Kinerja Keuangan Pemerintah Tak Jalan*.
- Aprisyah, P., & Yulianti, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(2).
- Ashari, M. I., & Kaukab, M. E. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (Jimmba)*, 2(5). <https://doi.org/10.32639/Jimmba.V2i5.669>
- Budi, E. P., Tongko, M., Herawati, H., & Sattu, M. (2020). Upaya Pemerintah Desa Terhadap Penanggulangan Stunting Di Wilayah Kerja Puskesmas Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Kesmas Untika Luwuk: Public Health Journal*, 11(2), 56–61. <https://doi.org/10.51888/Phj.V11i2.34>

- Erwin, E., Erfan, E., & Herwan, H. (2024). Strategi Komunikasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Dalam Peningkatan Citra Pemerintahan Kabupaten Bangka. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1). <https://doi.org/10.47134/Villages.V5i1.84>
- Ginting, E., Eka Putri, S., Yonatan Sinaga, Z., William Iskandar Ps, J. V, Baru, K., Percut Sei Tuan, K., Deli Serdang, K., & Penulis, K. (2024). Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat Dalam Peningkatan Apbn Dan Apbd Tahun Anggaran 2023. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1).
- Gunawan, S. E. (2018). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang. *Parsimonia*, 4(33).
- Ilham, I. (2019). Pengaruh Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Terhadap Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cianjur Dan Lima Kabupaten Di Jawa Barat. *Jurnal Momen Teknik Sipil*, 2(1). <https://doi.org/10.35194/Momen.V2i1.642>
- Inpres. (2025). Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. *Instruksi Presiden Republik Indonesia*.
- Khrisnadewi, A., & Praptiestrini. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2013 S/D 2016). *Surakarta Accounting Review (Sarev)*, 4(1), 35–43.
- Krisniawati, K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Aceh Timur. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.32505/Ihtiyath.V5i1.2572>
- Kusumaningrum, E. B., & Sugiyanto, H. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Fiscal Stress, Dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Ekonomi Bisnis*, 27(2), 630–643. <https://doi.org/10.33592/Jeb.V27i2.1815>
- Lirda, M., Rice Haryati, & Delori Nanci Meyla. (2023). Pengaruh Implementasi Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat). *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi*, 1(3). <https://doi.org/10.31933/Epja.V1i3.918>
- Muh Zulfi Qadri, A. H. P. H. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah, Nilai Tukar, Suku Bunga, Dan Defisit Anggaran Terhadap Utang Luar Negeri Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Seiko : Journal Of Management & Business*, 5(1).
- Nugraheni, & Khaerunisa, L. (2016). Analisis Proses Penyusunan E-Budgeting Pemerintah Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 4(02).
- Nurafni, A., Pembangunan, U., Budi, P., Sembiring, R., Pembangunan, U., & Budi, P. (2024). Pengaruh Anggaran Belanja Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Sumut. 2(8), 909–922.
- Rahmanto, F., Firmansyah, M. I., Purwaningsih, T., & Rafi, M. (2021). Politik Anggaran: Alokasi Dana Bansos Pra-Pemilihan Presiden 2019 Di Indonesia Sebagai Alat Meningkatkan Elektabilitas. *Jwp (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/Jwp.V6i1.29422>
- Rahmawati, E., & Adiyatama, E. A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran, Gaya Kepemimpinan Transaksional Dan Transformasional Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2). <https://doi.org/10.59330/Jai.V1i2.9>
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan

- Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda. *Journal Peqguruang: Conference Series*, 3(2). <https://doi.org/10.35329/Jp.V3i2.2215>
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(2).
- Setya Nusa, I. B., & Mutmainnah, U. G. (2022). Pengaruh Perencanaan Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survei Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bandung). *Journal Of Economics, Management, Business And Accounting*, 2(2). <https://doi.org/10.34010/Jemba.V2i2.8539>
- Setyawan, A. (2022). Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik Di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(05).
- Silalahi, D. E. S., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2).
- Sonny, H. (2012). Analisis Pengaruh Pengembangan Sdm Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang. *Jurnal Manajemen*, 09(3).
- Wongkar, D. L., Senduk, V., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*. <https://doi.org/10.53682/Jaim.V2i1.630>
- Yaqin, U. A., Herwanti, T., & Akram, A. (2018). Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Bima). *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/Eja.2018.V25.I03.P26>
- Zairi, M. (2019). *Serapan Anggaran Rendah, Anggota Dpra, Bardan Sahidi Sebut Kinerja Keuangan Pemerintah Tak Jalan*.